



ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY AND INDEPENDENCE TOWARD ECONOMIC GROWTH AND POVERTY IN CENTRAL JAVA

Jalu Aji Prakoso [✉], ² Fitrah Sari Islami, ³ Rr Retno Sugiharti

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 - 2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2013. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah analisis rasio keuangan dan kedua adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi model pertama menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian model kedua, dimana terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan. Artinya, dari kondisi kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan membawa dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan penduduk miskin. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.

Kata kunci: Kemampuan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

Abstract

This study aims to determine the effect of the level of regional financial capacity and regional financial independence on economic growth and the influence of the level of regional financial capacity, regional financial independence and economic growth on poverty in districts and cities in Central Java Province in 2009 - 2013. The data used are secondary data in the form of data on Budget Realization Reports (LRA), GRDP and Poverty Levels in regencies and cities in Central Java Province in 2009 - 2013. Data collection comes from secondary data that has been owned by the relevant agencies. The method of data analysis in this study is 2 kinds, the first is financial ratio analysis and the second is multiple linear regression. The results of the analysis state that the ratio of regional financial capacity is mostly in a very poor position and the results of the regional financial independence ratio are partly in an instructive condition. The first model regression results state that regional financial independence has a significant positive effect on economic growth. And the second model, where there is a significant negative effect on regional financial independence on poverty. That is, from the condition of regional financial independence in regencies and cities in Central Java Province will have an impact on increasing regional economic growth and reducing the poor population. Efforts need to be made for the government to increase revenues derived from the potential of each region so as to be able to increase its financial capacity and independence.

Keywords: Regional Financial Capacity, Regional Financial Independence, Economic Growth, Poverty

✉ Corresponding author:

E-mail: jaluaji@untidar.ac.id

© 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana tugas umum yang memiliki peran terhadap pengelolaan atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan telah lama dilaksanakan bahkan sejak masa perekonomian pra klasik. Seperti yang dikemukakan ekonom dari Perancis Jean Bodin (1530-1596) bahwa negara mempunyai kekuasaan terhadap warga negara, karena negara di atas hukum. Tidak terkecuali dengan Pemerintah Daerah yang memiliki cakupan kekuasaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat demi kesejahteraan warga juga perlu dipertanggungjawabkan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi daerah tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemerintahan dan juga sebagai pelayanan masyarakat. Besar kecilnya nilai keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengelolaan kekayaan daerah. Daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya merupakan daerah yang akan memiliki nilai penerimaan keuangan daerah yang tinggi. Daerah yang mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia merupakan daerah yang akan memiliki kemakmuran ekonomi.

Otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan sepenuhnya terhadap kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Masing - masing daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan otonomi merupakan langkah dari pemerintah pusat dalam menyokong tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan tersebut

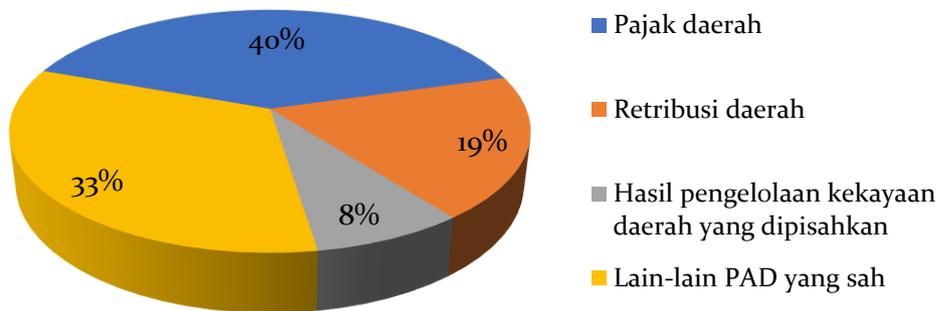
dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketetapan penyelegaraan otonomi daerah terwujud sejak beberapa tahun yang lalu, melalui ketetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ketetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (2) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Implementasi dari kedua peraturan untuk pemerintah daerah tersebut menjadikan pemerintah daerah sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas keadaan perekonomian daerahnya. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan sumber-sumber penerimaan keuangan yang dikelola daerah sebesar-besarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain harus dipertanggung jawabkan. Pemerintah selaku pengelola keuangan harus menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dananya.

Penilaian terhadap suatu daerah terhadap kemampuan mengelola keuangannya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Nilai PAD dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar nilai sumbangan PAD terhadap APBD maka menunjukkan bahwa semakin kecil nilai ketergantungan daerah terhadap pusat atas pendanaan pemerintahan. Apabila dilihat dari komposisi PAD sebagai sumber penerimaan daerah, maka Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah memiliki komposisi sebagai berikut:

Gambar 1
Komposisi PAD Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2013

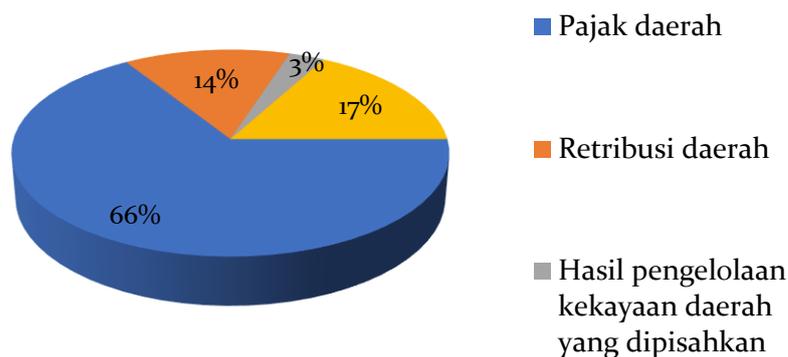


Sumber : Potret APBD Tahun 2013

Dari gambar 1 diatas menunjukkan bahwa Komposisi PAD di kabupaten seluruh Jawa Tengah memiliki dominasi di dalam penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 40 persen. Pada urutan kedua penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 33 persen. Urutan ketiga adalah penerimaan dari retribusi daerah sebesar 19 persen. Keempat merupakan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak 8 persen. Sedangkan untuk komposisi PAD Kota di

seluruh Jawa Tengah (gambar 2) memiliki kesamaan dalam dominasi pajak daerah sebagai penerimaan terbesar yaitu sebesar 22 persen. Posisi kedua merupakan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebanyak 17 persen. Retribusi daerah berada di urutan ketiga sebesar 14 persen. Pada posisi terakhir penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3 persen.

Gambar 2 Komposisi PAD Kota di Jawa Tengah Tahun 2013



Gambar 2 Komposisi PAD Kota di Jawa Tengah Tahun 2013

Sumber: Potret APBD Tahun 2013

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan pemerintahan

secara efisien dan efektif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di

Jawa Tengah sendiri jika dibandingkan dengan provinsi lain dipulau jawa memiliki trend yang positif. Dari tahun 2009-2013 telah mengalami peningkatan, seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2009-2013

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Banten	4,71	6,11	6,39	6,15	5,86
2	Jawa Barat	4,19	6,09	6,48	6,21	6,22
3	DKI Jakarta	5,02	6,50	6,73	6,53	6,85
4	Jawa Tengah	5,14	5,84	6,03	6,34	5,80
5	DIY	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40
6	Jawa Timur	5,01	6,68	7,22	7,27	6,21

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Jawa Tengah memiliki tren yang terus meningkat walaupun dalam skala yang relatif kecil. Pertumbuhan ekonomi di Jawa tengah sendiri didorong dari tumbuhnya sektor-sektor perekonomian yang dikelola oleh pemerintah dalam menjalankan peranan sebagai regulasi. Tren positif peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah mampu memberi dampak terhadap permasalahan sosial di masyarakat seperti kemiskinan.

Perumusan Masalah

Pemerintah mampu dan mandiri dalam bidang keuangan mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tanggungjawab tugas ke pemerintahannya. Pemerintah mampu meningkatkan sumber - sumber penerima asli daerah melalui pemetaan dan pengenalan atas potensi daerah yang dimiliki. Pengelolaan potensi daerah dengan efektif akan menghasilkan keuntungan bagi daerah, daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat semakin kecil. Melalui uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan kemandirian keuangan daerah / Derajat Otonomi Fiskal (DOF) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), kemandirian keuangan daerah / Derajat Otonomi Fiskal (DOF), dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Peran penting otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi di daerah memberikan prospektif sendiri dalam memahami artinya. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, otonomi daerah juga diinterpretasikan sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir

atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mewujudkan pembangunan kewenangan yang concurrent secara proposional antara pemerintah, daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota seperti yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka dirumuskan kriteria yang meliputi:

1. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut.
2. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
3. Kriteria efisiensi adalah dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersediannya sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Keuangan Daerah

Pengetian keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara Halim (2001: 19) (4) mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah merumuskan keuangannya melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun disusun dan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dengan APBD dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas, pembangunan yang akan dan yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Melakukan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi dan hasil-hasil produksi semakin meningkat.

Kemampuan Keuangan Daerah/Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan istilah lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah yang

satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Halim, 2007):

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah / Drajat Otonomi Fiskal (DOF)

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Balchard memperkenalkan "Hubungan Situasional" dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2001)

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Perhatikan tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses", bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Jika dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1982) (5).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks yang juga menuntut penanganan secara komprehensif. Masalah kemiskinan tidak dapat direduksi secara sederhana sebagai masalah kurangnya pendapatan, dan diberi solusi yang sederhana, misalnya dengan memperluas kesempatan. Kemiskinan dapat mengambil bentuk lain, seperti lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan dan kerentanan (Kuncoro, 2004). Wujud kemiskinan tersebut saling berhubungan dan merupakan suatu pola kemiskinan. Artinya masing-masing bentuk/wujud kemiskinan dapat melekat pada orang yang sama atau berbeda. Misalnya, orang yang miskin pendapatan, bisa pada saat yang sama miskin kapabilitas, miskin kelembagaan dan rentan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu kondisi kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009 – 2013.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut periode 2009 - 2013. Sedangkan sampel yang digunakan adalah bagian terkecil dari jenis laporan realisasi anggaran, pertumbuhan ekonomi dan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dari laporan realisasi anggaran berupa pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, dan bantuan dari pemerintah pusat/provinsi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 - 2013.

Model Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dan regresi linier berganda. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui rasio kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan daerah. Kedua rasio tersebut dapat dilihat melalui rumusan berikut.

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (DDF) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (DDF) = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Hasil perhitungan dari rasio DDF akan dilihat kedalam pola hubungan yang tertera dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah.

Tabel 2
Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio DDF (%)	Pola Hubungan
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik

2. Rasio Kemandirian Keuangan Dearah (DOF) menunjukkan tingkat kemampuan

suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (DOF) :

$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$

Hasil perhitungan dari rasio DFF akan dilihat kedalam pola hubungan yang tertera dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah.

Tabel 3
Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio DOF (%)	Pola Hubungan
0-25	Instruktif
>25-50	Konsultatif
>50-75	Partisipatif
>75-100	Delegatif
0-25	Instruktif

Sedangkan untuk regresi linier berganda dilakukan untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel Y apabila nilai pada variabel X berubah. Penggunaan analisis regresi liner berganda digunakan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. Persamaan model dalam penelitian ini disusun dalam dua model matematis. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

- 1) $GRW = \beta_0 + \beta_1 DDF + \beta_2 DOF + ei$
- 2) $POR = \beta_0 + \beta_1 DDF + \beta_2 DOF + \beta_2 GRW + ei$

Keterangan

- GRW : Pertumbuhan Ekonomi
 DDF : Kemampuan Keuangan Daerah / Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

- DOF : Kemandirian Keuangan Daerah / Drajat Otonomi Fiskal (DOF)
- POR : Tingkat Kemiskinan
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- β_0 : Konstanta
- ei : Variabel Pengganguran
- Keuangan Daerah (DDF), dan X_3 Pertumbuhan Ekonomi (GRW) terhadap variabel Y berupa kondisi kemiskinan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 – 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Model pertama (1) digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X_1 kemampuan keuangan daerah (DDF) dan X_2 kemandirian keuangan daerah (DOF) terhadap variabel Y pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 - 2013. Model kedua (2) disusun guna melihat pengaruh dari variabel X yang terdiri dari: X_1 kemampuan keuangan daerah (DDF), X_2 kemandirian

Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah melalui penggalan potensi-potensi daerah yang ada. Hasil dari perhitungan rasio DDF untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 – 2013 sebagai berikut.

Tabel 4
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Kabupaten / Kota	Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF)					Tngkat DDF				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Banjarnegara	7,07	7,35	6,12	8,26	7,73	Sangat Kurang				
2	Kab. Banyumas	11,33	13,50	11,93	13,34	15,13	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
3	Kab. Batang	7,24	7,04	7,34	9,07	13,21	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang
4	Kab. Blora	5,32	5,82	6,65	7,27	7,36	Sangat Kurang				
5	Kab. Boyolali	8,37	9,42	8,83	10,05	10,99	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang
6	Kab. Brebes	6,08	6,44	5,95	6,50	7,51	Sangat Kurang				
7	Kab. Cilacap	10,06	11,22	12,35	10,97	13,92	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
8	Kab. Demak	5,72	6,66	6,59	8,71	9,88	Sangat Kurang				
9	Kab. Grobogan	7,96	8,30	7,55	7,97	9,27	Sangat Kurang				
10	Kab. Jepara	9,13	9,38	8,86	9,90	9,30	Sangat Kurang				
11	Kab. Karanganyar	8,85	9,24	9,97	9,50	11,81	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang
12	Kab. Kebumen	5,37	6,01	5,77	7,08	8,08	Sangat Kurang				

No	Kabupaten / Kota	Drajat Desentralisasi Fiskal (DDF)					Tingkat DDF				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
13	Kab. Kendal	9,72	9,57	8,21	10,37	9,80	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Sangat Kurang
14	Kab. Klaten	5,39	5,18	5,30	5,61	6,65	Sangat Kurang				
15	Kab. Kudus	9,16	11,23	10,79	10,55	10,46	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
16	Kab. Magelang	6,80	7,97	8,12	9,43	12,13	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang
17	Kab. Pati	11,69	11,23	10,94	11,08	9,91	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sangat Kurang
18	Kab. Pekalongan	8,68	9,01	8,81	10,30	11,71	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang
19	Kab. Pemalang	7,80	8,19	7,40	7,29	9,17	Sangat Kurang				
20	Kab. Purbalingga	11,33	11,02	10,60	12,46	13,00	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
21	Kab. Purworejo	8,31	8,68	8,78	9,71	9,90	Sangat Kurang				
22	Kab. Rembang	9,19	9,64	8,46	10,15	10,88	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang
23	Kab. Semarang	11,57	11,72	14,22	12,41	15,70	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
24	Kab. Sragen	8,68	9,02	8,64	9,76	9,99	Sangat Kurang				
25	Kab. Sukoharjo	7,08	7,79	9,47	13,55	13,22	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang
26	Kab. Tegal	7,03	7,72	7,48	8,76	9,93	Sangat Kurang				
27	Kab. Temanggung	7,60	8,17	8,07	8,12	9,40	Sangat Kurang				
28	Kab. Wonogiri	6,34	6,62	6,61	7,47	7,49	Sangat Kurang				
29	Kab. Wonosobo	6,74	7,35	6,88	7,99	9,50	Sangat Kurang				
30	Kota Magelang	12,54	14,82	12,57	15,75	16,66	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
31	Kota Pekalongan	8,10	11,38	12,42	14,85	16,92	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
32	Kota Salatiga	11,09	12,53	12,68	13,84	17,59	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
33	Kota Semarang	16,13	20,20	24,94	30,77	33,11	Kurang	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang
34	Kota Surakarta	13,99	13,27	17,59	18,69	21,55	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup
35	Kota Tegal	21,37	21,98	21,41	24,07	24,36	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup

Rasio kemampuan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 1.4 diatas.

Berdasarkan kriteria kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten

dan kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kondisi kemampuan keuangan yang sangat kurang. Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rasio kemampuan keuangan daerah dengan kriteria cukup pada tahun 2013 adalah Kota Tegal dan Kota Surakarta. Daerah dengan rasio kemampuan keuangan daerah dengan kriteria sedang adalah Kota Semarang. Daerah dengan rasio kemampuan keuangan kurang terdiri dari 3 kota, yaitu Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Salatiga dan 12 kabupaten terdiri dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banyumas. Sedangkan daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah dengan kriteria sangat kurang terdiri dari 17 kabupaten, yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten

Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Banjarnegara.

Kondisi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Fiskal (DOF) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan dari pemerintah pusat/provinsi antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan dana pinjaman. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 sebagai berikut.

Tabel 5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Kabupaten / Kota	Derajat Otonomi Fiskal (DOF)					Tingkat DOF				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Banjarnegara	5,71	7,94	6,56	8,80	8,38	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
2	Kab. Banyumas	6,39	15,61	12,17	15,39	17,83	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
3	Kab. Batang	3,90	7,58	7,92	9,98	15,22	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
4	Kab. Blora	5,62	6,18	7,12	7,84	7,95	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
5	Kab. Boyolali	4,57	10,40	9,68	11,17	12,34	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
6	Kab. Brebes	6,47	6,88	6,33	6,95	8,12	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
7	Kab. Cilacap	5,59	12,63	11,56	12,32	17,16	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
8	Kab. Demak	4,68	7,14	7,05	9,54	10,96	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
9	Kab. Grobogan	6,63	9,05	8,17	8,66	10,21	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk

No	Kabupaten / Kota	Derajat Otonomi Fiskal (DOF)					Tingkat DOF				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
10	Kab. Jepara	8,03	10,35	9,72	10,99	10,34	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
11	Kab. Karanganyar	8,49	10,21	11,08	10,50	13,39	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
12	Kab. Kebumen	4,33	6,39	6,13	7,62	8,79	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
13	Kab. Kendal	5,38	10,58	8,94	11,57	10,86	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
14	Kab. Klaten	2,85	5,46	5,60	5,94	7,13	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
15	Kab. Kudus	5,04	12,65	12,09	11,79	11,68	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
16	Kab. Magelang	6,01	8,66	8,83	10,41	13,81	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
17	Kab. Pati	9,78	12,66	12,29	12,46	11,00	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
18	Kab. Pekalongan	4,75	9,91	9,66	11,48	13,44	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
19	Kab. Pemalang	6,54	8,92	6,28	7,86	10,10	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
20	Kab. Purbalingga	6,39	12,39	12,19	14,83	13,83	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
21	Kab. Purworejo	6,98	9,50	9,62	10,75	10,98	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
22	Kab. Rembang	7,57	10,67	9,25	11,30	12,21	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
23	Kab. Semarang	6,54	13,27	12,85	14,16	18,63	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
24	Kab. Sragen	7,22	9,91	9,45	10,81	11,10	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
25	Kab. Sukoharjo	6,38	8,35	10,46	15,67	16,01	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
26	Kab. Tegal	5,78	8,37	8,09	9,61	11,02	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
27	Kab. Temanggung	4,11	8,90	7,73	8,84	9,76	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
28	Kab. Wonogiri	5,43	7,09	7,08	8,07	8,10	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
29	Kab. Wonosobo	5,55	7,94	7,39	8,68	10,50	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
30	Kota Magelang	7,17	17,39	14,38	18,70	19,96	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
31	Kota Pekalongan	4,40	12,85	14,18	17,44	20,36	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
32	Kota Salatiga	10,47	14,32	14,52	16,06	21,34	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
33	Kota Semarang	15,44	25,32	26,10	44,45	49,50	Instruk	Konsul	Konsul	Konsul	Konsul
34	Kota Surakarta	8,13	15,30	21,35	22,99	27,46	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk	Instruk
35	Kota Tegal	13,59	28,18	27,24	31,70	32,21	Instruk	Konsul	Konsul	Konsul	Konsul

Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 kota yang memiliki kriteria kemandirian keuangan konsultatif, yaitu Kota Tegal dan Kota Semarang. Selain kedua daerah tersebut merupakan daerah dengan kondisi kemandirian keuangan yang

instruktif. Artinya, mayoritas wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki keterikatan kuat terhadap pemenuhan keuangan dari pemerintah pusat.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dalam dua tahap analisis. Kedua tahap ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel dependen dan independen dari dua persamaan tersusun. Regresi persamaan pertama menghasilkan perhitungan sebagai berikut.

- 1) Model yang pertama, variabel independen yaitu Kemampuan

Model Pertama Y (GRW)				
Fixed Effect Model	Beta	Standar Error	t	Sig.
1 (Constanta)	9.9041	5297.09	10.9228	0.0000
X1 (DDF)	0.1112	588.52	-0.6404	0.6460
X2 (DOF)	0.1635	0.00	1.8560	0.0562

Setelah melakukan perhitungan dengan regresi, dan menggunakan model yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 9.9041 + 0.1112X_1 + 0.1635X_2$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai a = 9.9041 menunjukkan bahwa apabila kondisi kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah tidak mengalami perubahan atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten dan

Model Kedua Y (POR)				
Fixed Effect Model (FEM)	Beta	Standar Error	t	Sig.
1 (Constanta)	157.0705	1.8524	84.7927	0.0000
X1 (DDF)	0.1589	0.3471	0.4577	0.6479
X2 (DOF)	-1.2541	0.1943	-6.4559	0.0000
X3 (GRW)	-0.0049	0.0031	-1.5669	0.1194

Setelah melakukan perhitungan dengan regresi, dan menggunakan model yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Fiskal (DOF) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GRW). Berikut ini adalah hasil regresi yang dimasukkan ke dalam model matematis :

kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 9.9041 persen.

- b. Nilai koefisien regresi kemandirian keuangan daerah (X_2) signifikan pada toleransi 5 persen dengan nilai koefisien = 0.1635 menunjukkan bahwa apabila kondisi kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1 poin kemandirian, akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Tengah sebesar 0.1635 persen.

- 2) Model yang kedua, variabel independen yaitu Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Fiskal (DOF), dan Pertumbuhan Ekonomi (GRW) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan (POR). Berikut ini adalah hasil regresi:

diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 157.0705 + 0.1589X_1 + 1.2541X_2 - 0.0049 X_3$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai a = 157.0705 menunjukkan bahwa apabila kondisi kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan

ekonomi tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 157 orang.

- b. Nilai koefisien regresi kemandirian keuangan daerah (X_2) signifikan pada toleransi 5 persen dengan nilai koefisien = -1.2541 menunjukkan bahwa apabila kondisi kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1 poin kemandirian, akan menyebabkan penurunan kemiskinan pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah sebesar 1 orang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Hasil analisis rasio kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kondisi kemampuan keuangan yang sangat kurang.
- b. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 kota yang memiliki kriteria kemandirian keuangan konsultatif, yaitu Kota Tegal dan Kota Semarang. Selain kedua daerah tersebut merupakan daerah dengan kondisi kemandirian keuangan yang instruktif.
- c. Hasil analisis model pertama menunjukkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- d. Hasil analisis model kedua terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Saran

Pencapaian otonomi daerah tidak akan tercapai apabila pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penggalan terhadap potensi - potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Selain itu, ketika otonomi daerah tidak diterapkan dengan baik maka pemerintah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak akan terlepas dari ketergantungan dari pemerintah provinsi/pusat. Apabila pemerintah kabupaten dan kota mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan mengurangi ketergantungan terhadap ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat, maka dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi jumlah kemiskinan pada setiap pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1982. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kuncoro Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga..
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.